

**PERUBAHAN EKSISTENSI POLISI DALAM MENANGANI  
KEJAHATAN DARI POLWILTABES KE POLRESTABES  
MAKASSAR**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**MUH.FAUZianto.KR**  
**NIM: 10500113143**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fauzianto. KR  
Nim : 10500113143  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 21 Maret 1996  
Alamat : Jln. Bonto Sunggu.  
Judul : Perubahan Eksistensi Polisi Dalam Menangani Kejahatan Kota Makassar dari POLWILTABES ke POLRESTABES MAKASSAR.

Menyatakan dengan sesungguhnya dari penulis penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar Adalah hasil karya sendiri. jika di terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan Atau dibuat Orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena Batal demi hukum.

Makassar, 15 Juni 2017

Penyusun



Muh.fauzianto.kr

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Perubahan Eksistensi Polisi Dalam Menangani Kejahatan Kota Makassar dari POLWILTABES ke POLRESTABES Makassar" yang disusun oleh saudara Muh. Fauzianto. Kr. NIM: 10500113143, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, bertepatan dengan Ramadhan – Syawal 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 15 Juni 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqomah, SH., MH	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH	(.....)
Munaqisy II	: Rahman Syamsuddin, SH., MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, SH., MH	(.....)
Pembimbing II	: ST. Nurjannah, SH., MH	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag  
NIP.19621016 199003 1 003

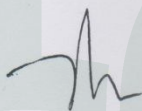
#### PERSETUJUAN PENGUJI

Penguji penulisan skripsi saudara **MU.FAUZianto.KR**, NIM: **10500113143**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "PERUBAHAN EKSISTENSI POLISI DALAM MENANGANI KEJAHATAN DI KOTA MAKASAR DARI POLWILTABES KE POLRESTABES", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

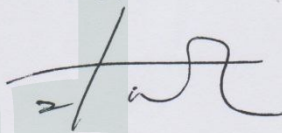
Samata, 9 Juni 2017

Penguji I



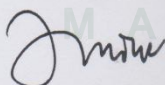
Rahman Syamsuddin, SH, MH  
NIP. 19821207 200901 1010

Penguji II



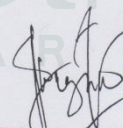
Dr. Fadli Andi Natsif  
NIP. 1966101620141101001

Pembimbing I



Dr. Jumadi, SH., M.H  
NIP. 196302041994031003

Pembimbing II



ST. Nuriannah, SH, MH  
NIP. 197608222003122003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robil 'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Perubahan Eksistensi Polisi Dalam Menangani Kejahatan Dari Polwiltabes Ke Polrestabes Makassar". Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, pemberi rahmat bagi alam semesta yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, yang selalu dinantikan syafaatnya hingga hari akhir. Amin.

Penulis sadar bahwa selyaknya manusia biasa maka tidak akan mungkin dapat hidup dan berkembang tanpa bantuan orang lain. Olehnya itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, tulus dari hati yang paling dalam kepada orang yang penulis kagumi dan hormati kepada orang yang mengajarkan arti dari sebuah perjuangan dan makna dari hidup ini Ayahanda dan Ibunda yang penuh dengan kasih sayang, memotivasi, mendoakan dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan penulis.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Musafir Pababbri M.Ag , selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr.Darussalam Syamsudin,M.Ag., selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum, dan para Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dalam hal ini

selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik, selaku Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum, selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan.

3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum
4. Dr. Jumadi SH, MH selaku Pembimbing I dan dan ibu St. Nurjannah. SH. MH selaku Pembimbing II, yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, dan motivasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. selaku munaqisy I dan II yang juga banyak memberikan kritik serta saran yang membangun, hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. selaku administrator pelayanan perizinan terpadu Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah bersedia untuk membuat surat izin penelitian Polrestabes Makassar
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, serta berbagi pengalaman sehingga dapat memperluas wawasan keilmuan penulis.
8. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada senior-senior, teman-teman dan adik-adik penulis di Kampus UIN Alauddin Makassar, khususnya teman-teman se-ruangan penulis di Jurusan Ilmu hukum, angkatan 2013. Berteman dan bergaul dengan kalian, membuat penulis menjadi lebih dewasa dan mendapatkan sejuta pengalaman serta pengetahuan yang bisa menambah wawasan keilmuan penulis.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini Kepada Allah SWT. Jugalah, penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Samata, 10 April 2017



**Muh. Fauzianto. kr**





## **ABSTRAK**

**Nama Penyusun : Muh.Fauzianto.Kr**  
**Nim : 10500113143**  
**Judul Skripsi : Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari Polwiltabes ke Polrestabes Makassar**

---

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui fungsi kepolisian atas berubahnya status dari Polwiltabes Makassar menjadi Polrestabes Makassar Dan Untuk mengetahui Efektifitas Polisi dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar.

Metode penelitian menggunakan wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen penting. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan atau Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran.

. Hasil Penelitian sebagai berikut : (1) Perbedaan yang ada setelah berubahnya Polwiltabes menjadi Polrestabes adalah Adanya penggabungan antara dua kepolisian resort kota wilayah yaitu kepolisian resort kota Makassar timur atau yang biasa disebut Polresta Makassar Timur dan Kepolisian resort Kota Makassar barat atau biasa disebut Polresta Makassar barat. Kedua Polresta tersebut saat ini digabung atau disatukan menjadi Polrestabes Makassar (2). Penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh Polrestabes Makassar itu lebih efektif dibanding dulu waktu Polwiltabes Makassar.

Solusi dan Saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:  
Institusi kepolisian terkhusus Polrestabes Makassar saat ini adalah harus lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dalam menangani kejahatan di Kota Makassar. Agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat Kota Makassar.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A    Latar Belakang.....	1
B    Rumusan Masalah .....	8
C    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
 <b>BAB II    TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A    Kepolisian.....	10
1. Sejarah Lahirnya POLRI.....	10
2. Eksistensi Kepolisian.....	14
3. Pengertian, Tugas, Wewenang Kepolisian.....	22

B	Pengertian Kejahatan.....	36
	1. Kejahatan dari Segi Yuridis .....	36
	2. Kejahatan dari Segi Sosiologis.....	44
C	Jenis-jenis Kejahatan .....	45
D	Penanggulangan Kejahatan .....	51
E	Teori Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi .....	53
F	Teori Efektivitas Hukum.....	56
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	57
B	Pendekatan Penelitian .....	61
C	Populasi dan Sampel.....	61
D	Sumber Data.....	62
E	Metode Pengumpulan Data .....	62
F	Instrumen Penelitian.....	63
G	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A	Dasar Alasan Perubahan Status Polwiltabes Menjadi Polrestabes...	65
B	Fungsi Kepolisian Atas Berubahnya Status Dari Polwiltabes Makassar Menjadi Polrestabes Makassar .....	67

C	Efektifitas Polisi Dalam Menanggulangi Kejahatan di Kota Makassar.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	77

#### LAMPIRAN

#### DAFTAR PUSTAKA

#### RIWAYAT HIDUP



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan

Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan `masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum

itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>1</sup>

Tujuan hukum seperti dituliskan Martiman Projohamidjoyo sebagai berikut ; hukum bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat ketertiban, karena hukum menyangkut kepentingan masyarakat dan dengan adanya hukum akan tercipta masyarakat yang tertib hukum, untuk menghendaki agar tingkah laku manusia baik lahiriah maupun bathiniah sesuai dengan peraturan hukum.<sup>2</sup>

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.<sup>3</sup>

. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi

---

<sup>1</sup> Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. VI;( Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.50

<sup>2</sup> Martiman Projohamidjoyo, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1982), h 24

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 40.

masyarakat sekitar. Hal ini tidak saja dialami oleh masyarakat perkotaan namun sudah meluas di lingkungan pedesaan.

Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi selama ini. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

Dalam praktek di lapangan, kejahatan yang menjurus pada tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pengrusakan dan kekerasan dengan segala bentuknya hal itu dimaksudkan untuk mempermudah hal yang diinginkan oleh pelaku. Tindakan tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan serta meminta banyak perhatian dari masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya.<sup>4</sup>

Walaupun bangsa ini menginginkan agar tindak pidana itu ditekan seminimal mungkin, namun keinginan dan cita-cita itu merupakan sesuatu yang saat ini sangat sulit terwujud dalam kenyataan, mekipun akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu sangat merugikan harta dan nyawa manusia.

Keadaan yang aman dan tentram sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat tidak lepas dari adanya alat kekuasaan sebagai lembaga atau

---

<sup>4</sup> Patanduk, Nova. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi Makassar: (Fakultas Hukum Unhas, 2013), h 36

instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini Polisi Republik Indonesia yang mempunyai peranan penting.

Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat memanglah tidak mudah. Semua itu tergantung pada setiap individu yang ada pada lingkup

---

<sup>5</sup> Noach, Simanjuntak. B. dan Pasaribu. I. L. *Kriminologi*, Bandung: (Tarsito, 1984), h 14



masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Mampu atau tidak memperjuangkan hal tersebut terutama dalam hal kualitas perilaku dan pengendalian diri dari setiap individu tidak dapat di kontrol lagi pada akhirnya dapat terjadi kejahatan sehingga timbul ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap yang berada di lingkungan sekitar.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (*social injury*), atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial), ataupun perilaku yang tidak disesuaikan dengan pedoman hidup bermasyarakat (*non-conformist*). Konsekuensi dari proses interaksi sosial yang menyangkut terhadap perilaku kejahatan akan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dalam masyarakat mempunyai berbagai wujud, yakni sebagian kejahatan ada yang dihukum sesuai dengan rumusan-rumusan hukum tentang kejahatan, dan sebagian lain ada pula yang diberikan reaksi sosial tanpa dihukum. Wujud reaksi sosial berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial, baik yang formal oleh pejabat yang berwenang maupun yang informal oleh kalangan masyarakat tertentu.

Terjadinya proses kejahatan ditinjau dari tingkat pertumbuhan sejak dahulu, dapat dikelompokkan menjadi bentuk kejahatan individual dan kejahatan konvensional yang menyentuh kepentingan orang dan harta kekayaan sebagaimana telah dirumuskan dalam aturan hukum pidana atau kodifikasi hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang

makin kompleks kepentingannya itu, menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan inkonvensional yang makin sulit untuk merumuskan norma dan saksi hukumnya, sehingga menumbuhkan aturan hukum pidana baru yang bersifat peraturan khusus. Kejahatan konvensional menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, dan lain-lainnya yang dinyatakan sebagai perilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang makin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum pidana yang berlaku umum.

Dilihat dari segi kuantitas, tindak kejahatan yang terjadi sekarang ini semakin meningkat. Tindak kejahatan yang meningkat itu disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai contoh dapat kita ketahui banyak Para pemuda yang menjadi pengamen dan anak jalanan yang melakukan tindak kekerasan terhadap para pemakai jalan ataupun penumpang bus yang tidak mau memberikan uang mereka kepadanya. Tindak kekerasan dan pemaksaan itu merupakan wujud dari tindak kejahatan yang banyak terjadi sekarang ini. Hal ini merupakan fenomena sosial yang tidak mungkin kita pungkiri.

Dari segi kualitas para pelaku kejahatan semakin lihai dalam menghilangkan jejak mereka dan menyembunyikan identitas korbannya. Sebagai contoh pelaku kejahatan pembunuhan dengan melakukan pemotongan pada tubuh korban dengan maksud menghilangkan jejak dan identitas korban. Bukti lain bahwa kejahatan semakin canggih baik dari sudut kualitas pelaku kejahatan maupun sarana yang digunakan, yaitu kejahatan pencurian dengan menggunakan sarana komputer sebagai alat tindak kejahatan. Pelaku kejahatan yang sering

disebut sebagai hecker ini dinilai dari sudut kualitas pelaku kejahatan dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sudah dapat dikatakan canggih. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan tindak kejahatan ini.

Menurut sistem hukum kita, yaitu KUHAP, aktivitas pemeriksaan terhadap suatu kasus pidana melibatkan:

1. Kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan pendahuluan
  2. Kejaksaan, selaku penuntut umum, dan sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkannya ke Pengadilan.
  3. Pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim.
- Salah satu asas yang penting dalam Hukum Acara Pidana adalah asas praduga tak bersalah yang termuat dalam perumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4. Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut di muka pengadilan dianggap tak bersalah hingga pengadilan memutuskan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Dengan bersumber asas praduga tak bersalah yang harus dipegang oleh polisi, meski bukti kuat dalam penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan, seorang tersangka tetap tidak dianggap bersalah. Penyidikan terhadap kejahatan

---

<sup>6</sup> Kastama, I Made. *Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan.*  
[http://Jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpenyang/article/download/36/5\(20Mei2016\)](http://Jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpenyang/article/download/36/5(20Mei2016))

merupakan suatu cara atau prosedur untuk mencari serta memberikan pembuktian-pembuktian dalam menerangkan suatu peristiwa yang terjadi mengenai kejahatan yang dilakukan. Penyidik akan menerima perintah dari atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan pengusutan, mengumpulkan keterangan sehubungan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian akan menyerahkan berkas pemeriksaannya tersebut ke Kejaksaan untuk diambil tindakan selanjutnya. Hasil penyidikan akan membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah menemukan siapa tersangkanya dengan jalan penyidikan secara singkat penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dari uraian diatas maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari Polwiltabes ke Polrestabes Makassar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang masalah maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi kepolisian atas berubahnya status dari Polwiltabes Makassar menjadi Polrestabes Makassar?
2. Bagaimana Efektifitas Polisi dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi kepolisian atas berubahnya status dari Polwiltabes Makassar menjadi Polrestabes Makassar
- b. Untuk mengetahui efektifitas Polisi dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan tentang tinjauan yuridis atas berubahnya status dari Polwiltabes Makassar menjadi Polrestabes Makassar.
- b. Memberikan pengetahuan tentang efektifitas Polisi dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Kepolisian***

##### ***1. Sejarah Lahirnya POLRI***

Lahir, tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban dimasa perang. POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersamasama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu satunya satuan bersenjata yang relative lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1949, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang, pada kenyataanya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda

menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana mana.

Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) akan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia di mata dunia. Andil dan pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri. POLRI juga sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM, dan G 30 S/PKI. serta berbagai penumpasaan GPK.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, POLRI bukan hanya mengurus kemanan dan ketertiban dalam negeri saja, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebgaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Nambia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). Tentang POLRI.



Kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Kemandirian POLRI dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan POLRI dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab POLRI sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian POLRI dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

- a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susana dan kedudukan.
- b. Aspek Instrumental: mencakup filosofi (Visi, Misi, dan Tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek.

c. Aspek Kultural: Adalah muara dari perubahan aspek structural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan POLRI kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, systemrekrutmen, system pendidika, system material fasilitas dan jasa, system anggaran dan system operasional. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka POLRI akan terus melakukan perbuhan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

## 2. *Visi dan Misi POLRI*

VISI POLRI : Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. MISI POLRI :

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- a). Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
- b). Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

- c). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma -norma dan nilai -nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e). Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f). Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- g). Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- h). Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i). Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

## **2. Eksistensi Kepolisian**

Organisasi Negara Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan. Dari arti struktur tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari

bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh. Dengan demikian struktur organisasi Kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan.

Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiri dari bagian-atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam setiap organisasi mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal Struktur formal meliputi bagan organisasi dan garis otoritas (misalnya, kepala, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain). Menurut Berger struktur informal dari organisasi ini berfungsi untuk mempertahankan sistem organisasi dengan melancarkan situasi yang sulit, mengisi ketimpangan yang ditinggalkan terbuka oleh prosedur formal.

Disisi lain Hughes menambahkan, bahwa organisasi informal menjadi sebuah pola tetapi lebih bersifat individual dan cara bertindak perorangan. Berpijak pada pendapat Berger dan Hughes di atas, kajian terhadap struktur organisasi ini ditekankan pada struktur formal, yakni bagan dari organisasi dan garis otoritas organisasi kepolisian. Beranjak dari pengertian organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Waldo, bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Dengan demikian hubungan antara kepolisian pusat dan daerah sebagai hubungan yang berdasarkan atas wewenang formal dan sistem administrasi, artinya wewenang yang melekat berdasarkan ketentuan

undang-undang untuk mengatur, melaksanakan tugas dan wewenang organisasi yang tersusun dalam satu sistem administrasi.

Asumsi dasar tentang organisasi ini sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir aliran struktural modern, seperti TomBum, Stalker, Peter M. Blau dan beberapa pendukung lainnya, bahwa organisasi adalah merupakan suatu institusi yang rasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal.

Atas dasar asumsi tersebut dapat dicermati, bahwa organisasi Kepolisian adalah institusi rasional yang eksistensinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki otoritas sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memudahkan pengendalian organisasi akan tetapi resiko dari penjenjangan susunan organisasi ini menjadikan sistem pengendalian bercorak komando, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai pengemban profesi.

Secara teoritis pembagian daerah hukum terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah dan batas tanggungjawab. Model pembagian kewenangan antara pusat dan daerah ini mengingatkan pada suatu konsep pemerintahan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Di dalam negara kesatuan ke-dua sistem ini menurut Hoessein harus dalam posisi seimbang dan tidak mungkin memilih salah satu, karena akan terjadi anarkhi, oleh karena itu diambil jalan tengah, yakni desentralisasi dan sentralisasi.

Menurut Litvack & Seddonarti desentralisasi adalah “thetransfer of authority and responsibility of public function from central government to subordinate or quasi-independent government organization or he prevatesector”transfer kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik, transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta).Melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat (Mabes Polri) dengan kepolisian di tingkat Propinsi (Polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan sentralisasi secara seimbang.

Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian ditingkat daerah, distribusi sarana dan prasaranaserta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum,pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas.

Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Demikian halnya

penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi dibawahnya, yakni Polda dan berjenjang ketingkat Polwil sampai Polres.

Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dimana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah (topdown) dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (bottomup).

Jenjang organisasi tersebut terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri berada ditingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, Kepolisian Wilayah (Polwil) berada di wilayah dan di bawah Polda, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polwil, bahkan sampai tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Ini semua sebagai mata rantai yang tidak terputus, sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri),

Seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau



bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah. Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan [vide: pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)].

Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan;
2. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf;
3. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus;
4. Unsur Pelaksana Utama Pusat; Satuan organisasi penunjang lainnya.

Tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/ 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dirubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/30AT/2003 tanggal 30 Juni

2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep/53/X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keluarnya Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itwasum Polri, Divpropam Polri serta Baintelkam Polri.

Di dalam Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tersebut mengatur tentang satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri, namun demikian belum memuat Organisasi dan tata kerja Itwasum Polri, Divpropam dan Baintelkam Polri dengan segala perubahannya, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai penyempurnaannya. Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53A/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/ 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan;
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;

- 3) Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- 4) Unsur Pelaksana Utama.
- 5) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikaitkan dengan rumusan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian.

Dengan demikian, tugas pokok Kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum(public servant), sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada

terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden. Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.

Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensiil, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Selain itu dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

### ***3. Pengertian , Tugas Dan Wewenang Kepolisian***

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya.

Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25).<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” (Inggris), “polite” (Belanda), “polizei” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

---

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1988), h 25

Pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan untuk dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi keamanan dan ketertiban adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik individu atau selaku bagian dari kelompok

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Adapun sejarah perkembangan kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
2. Pada masa kolonial Belanda Pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commissaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bloembergen, Marieke, 2011, *Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan*, PT Kompas Media Nusantara



### 3. Masa pendudukan Jepang<sup>9</sup>

Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Awal Kemerdekaan Indonesia.

### 4. Periode 1945-1950

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun. Dan secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

---

<sup>9</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta : Paradigma, 2007)

Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.<sup>10</sup>

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden.

Pada tahun 1950 presiden mengeluarkan Tap Pemerintah RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009.)

## 5. Periode 1950-1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.

Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi

(PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).<sup>11</sup>

Masa Orde Lama Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirilah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No.

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*

21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut : Alat Negara Penegak Hukum - Koordinator Polsus - Ikut serta dalam pertahanan - Pembinaan Kamtibmas - Kekaryaan - Sebagai alat revolusi Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

#### 6. Masa Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk

meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*.

Dari ketiga tugas pokok kepolisian di atas dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good-governance.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

Sering kali kita mendengar dan menyaksikan kasus-kasus kriminal di mana polisi seringkali terlibat di dalamnya. Menurut Lembaga Transparency International Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang paling korup di Indonesia dengan index 4,2 %. Hal ini terkait dengan tugas polisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.



Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## ***B. Pengertian Kejahatan***

### ***1. Kejahatan dari Segi Yuridis***

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R. Soesilo menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah: “Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP Pidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.<sup>13</sup> Ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Politeia, Bogor, 1995) h 5

pamungkas. Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana.

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

d. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Ke dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Sellin (Simandjuntak, 1980:9) menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut

kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan. Menurut Simandjuntak (1980:10) ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau

murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Selanjutnya menurut Mulyana W. Kusuma ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat

kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota, Redeliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Kriminolog kritis Mulyana W. Kusuma mengemukakan bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*ConductNorm*), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.
2. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika



terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

3. Merupakan pelanggaran hukum pidana:

a) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

b) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

4. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

5. Herman Mannheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Setelah penulis membaca dan memahami pendapat dari beberapa ahli tentang rumusan dan definisi mengenai kejahatan, penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda.

Perbedaan luas dan sempit batasan diberikan tergantung dari sudut mana kejahatan tersebut dipandang.

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHPidana jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHPidana misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana.

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (Inmoril) merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

## ***2. Kejahatan dari Segi Sosiologis***

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata

dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam Undang-undang pidana.

Menurut R. Soesilo bahwa: “Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat”. Sementara menurut, bahwa: “Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama, keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat”.

### ***C. Jenis-Jenis Kejahatan yang ditangani Kepolisian***

Pengertian kejahatan menurut tata adalah: “Perbuatan atau tindakan yang jahat, yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia”. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan

yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan.

Manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles dalam bukunya schaff, menyatakan bahwa:

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.<sup>14</sup>

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana. Sutherland (memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari Undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*). Sementara menurut Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Ada empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

---

<sup>14</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana* , (Liberty, Yogyakarta, 1995)h 17

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
- b. *Cultural Deviance*(penyimpangan budaya).
- c. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden (A.S Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ‘samar pola’ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang



harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Beberapa perbuatan yang tergolong dalam perbuatan kriminal antara lain:

1. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati, pengracunan sampai mati.
2. Perampasan, perampokan, penyerangan, penggarongan,
3. Pelanggaran seks dan pemerkosaan.
4. Maling, mencuri.
5. Pengancaman, intimidasi, pemerasan.
6. Pemalsuan, penggelapan, fraude.
7. Korupsi, penyogokan, penyuapan.
8. Pelanggaran ekonomi.
9. Penggunaan senjata api dan perdagangan gelap senjata-senjata api.
10. Pelanggaran sumpah.
11. Bigami yaitu kawin rangkap satu saat.
12. Kejahatan-kejahatan politik.
13. Penculikan.
14. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lambroso, ialah sebagai berikut :

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat hereditas (born criminals) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomali cacat dan kekuangan jasmaniah. Misalnya

bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip binatang. Wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang masuk melengkung ke belakang, dan lain-lain.

2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihindangi histeria, melankoli, epilepsi atau ayan, dementia yaitu lemah pikiran, dementia praecox atau lemah pikiran yang sangat dini, dan lain-lain.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksual atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan. Misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa, dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Fia membaginya dalam pseudo-criminals (pura-pura) dan criminaloids.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai kebiasaan yang buruk, asosiasi sosial yang abnormal atau menyimpang dari pola kelakuan umum, sehingga sering melanggar undang-undang dan norma sosial, lalu banyak melakukan kejahatan.

#### ***D. Penanggulangan Kejahatan***

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara

pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya preventif ini adalah sebuah tindak lanjut dari upaya Pre Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadi kejahatan dalam upaya preventif yang dilaksanakan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan pada penitipan motor. Dengan demikian menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan, jadi didalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (Law Inforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### ***E. Teori Penanggulangan Kejahatan oleh Polisi***

Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak pula tuntutan hidup masyarakat. Banyaknya tuntutan masyarakat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Saat dampak negatif timbul dan menyebabkan pertentangan kepentingan dalam masyarakat sehingga pelanggaran hukum terjadi, maka institusi hukum berkewajiban untuk menyelesaikannya. Disinilah peranan institusi hukum diperlukan untuk menegakkan hukum.

Tidak semua pelanggaran merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan yang dipidana sehingga, perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman siksa badan (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011: 9).<sup>15</sup> Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan penanggulangan oleh lembaga hukum yang ada. Dalam hal ini, lembaga hukum yang diaksud adalah kepolisian. Penanggulangan berarti upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 2011), h 9.

G. P. Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arief menjelaskan tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>16</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya – upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal” Yahya Harahap Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menjelaskan secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

---

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, (Sinar Grafika, Jakarta 2014)

kondusif. itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>17</sup> Penanggulangan yang dilakukan kepolisian dapat berupa tindakan nonpenal yang bersifat preventif dan penal yang bersifat represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar factor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi yang tertib tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

Penanggulangan oleh kepolisian yang berupa tindakan preventif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelanggar hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, SH, MH, *Hukum Acara Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)h,50.

### ***F. Teori Efektivitas Hukum***

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.

Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup." Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Davis, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan lokasi penelitian***

a) Jenis penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan atau empiris. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran.

b) Lokasi penelitian: Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes makassar (Polwiltabes makassar) *Gambaran Umum Kepolisian Polrestabes Makassar*

Suatu hal yang sangat penting tentang keadaan lokasi penelitian, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap suatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena sangat penting itulah sehingga kami uraikan sedikit gambaran umum tentang wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Luas wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu seluruh wilayah kota Makassar dengan luas kota makassar 175,77 km<sup>2</sup> dari 14 kecamatan (mariso, mamajang, tamalate, rappocini, makassar, ujung Pandang, wajo, bontoala, ujung tanah, tallo, panakkukan, manggala, biringkanaya dan tamalanrea) dengan 143 kelurahan dan batas-batasnya sebagai berikut:



- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pangkep
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten gowa
- c. Sebelah barat berbatasan dengan selat makassar
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten maros

Wilayah pemerintahan Polrestabes Makassar yaitu :

1. Kota : 1
2. Kecamatan : 14
3. Kelurahan : 143

Sumber daya alam dan binaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar (Kota Makassar) terdiri atas:

a. Sumber daya alam

1. Pertanian
2. Perikanan
3. Peternakan
4. Kerajinan Tangan

b. Sumber daya buatan

1. Industri/Kima PT. IKI
2. Pabrik/Baja Dan Minyak

Dalam struktur kepolisian terdapat beberapa bagian-bagian tugas dan wewenang yang terdapat dalam UU no. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tatakerja pada tingkat kepolisian resort diantaranya:

- a. Bagian operasi yang selanjutnya disebut Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang operasional pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- b. Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.
- c. Bagian sumber daya yang selanjutnya disingkat Bagsunda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang personel, sarana dan prasarana, serta hukum pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- d. Seksi pengawasan yang selanjutnya disingkat siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang monitoring dan pengawasan pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- e. Seksi Profesi dan bagian Pengamanan yang selanjutnya disebut Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang provos dan pengamanan internal pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.
- f. Seksi keuangan yang selanjutnya disingkat sikeu adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang keuangan pada tingkat polres yang berada dibawah kapolres
- g. Seksi umum yang selanjutnya disingkat sium adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada dibawah kapolres

- h. Sentra pelayanan kepolisian terpadu atau disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok dibidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- i. Satuan reserse kriminal yang selanjutnya disingkat satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- j. Stuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang selnjutnya disingkat satres narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok funsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah kapolres.
- k. Satuan pembinaan masyarakat yang selanjutnya disingkat satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada dibawah kapolres
- l. Satuan samapta bayangkara yang selanjutnya disingkat satsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bayangkra pada tingkat Polres dibawah kapolres
- m. Satuan lalulintas yang selanjutnya disingkat satlantas yang selanjutnya disingkat dengan satlantas adalah unsur pelaksana pokok fungsi lalulintas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres
- n. Satuan pengamanan objek vital yang selanjutnya satpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada tingkat Polres yang berada dibawah kapolres.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi
- 2) pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian populasi dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian di Polrestabes makassar (Polwiltabes makassar) .

### **2. Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang diambil melalui suatu cara tertentu yang jelas dan lengkap dapat mewakili populasi. Sehingga jelas bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian di Polrestabes makassar (Polwiltabes makassar) , yang bersedia menjadi pihak yang diwawancarai.

## **D. Sumber Data**

Dalam penulisan proposal ini, untuk mengumpulkan data, maka dilakukan penelitian lapangan di Polrestabes makassar (Polwiltabes makassar) dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan

### 2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

### ***E. Metode Pengumpulan data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
- b) Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen penting.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

b) Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

**G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a) Bentuk Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun bentuk-bentuk pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari wawancara maupun data tertulis.
- 2) Proses data dengan cara memilah-milah data.
- 3) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu.
- 4) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.

b) Analisis data

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dikelola mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kembali.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Dasar Alasan Perubahan Status Polwiltabes Menjadi Polrestabes***

Pada tanggal 19 Februari 2010 Penghapusan polwil dan polwiltabes mengalami Penghapusan sebagai konsekuensi logis reformasi struktural Polri untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di seluruh Indonesia, jumlah polwil dan polwiltabes mencapai 21. Rinciannya tiga berada di wilayah Polda Sulawesi Selatan Barat (Polwiltabes Makassar, serta Polwil Pare-Pare dan Bone), lima di Jawa Barat (Polwiltabes Bandung, serta Polwil Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Priangan). Lalu enam berada di wilayah Polda Jawa Tengah (Polwiltabes Semarang, serta Polwil Banyumas, Pekalongan, Kedu, Surakarta, dan Pati), serta tujuh di Jawa Timur (Polwiltabes Surabaya, serta Polwil Madiun, Bojonegoro, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura). Di luar wilayah tersebut, Polres maupun Polresta langsung berada di bawah polda.

Penghapusan polwil dan polwiltabes sejalan dengan Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selain itu juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007, yang di antaranya mengatur wilayah hukum Polri antara lain menyesuaikan pembagian wilayah administrasi di daerah, serta perangkat sistem peradilan pidana. Untuk pelaksanaannya, dikeluarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/15/XII/ 2009.



Likuidasi polwil dan polwiltabes adalah konsekuensi logis reformasi struktural Polri. Salah satu tujuannya mempercepat wujud Mabes Polri yang ramping, polda yang sedang, polres yang besar, dan polsek yang kuat depan fungsi Mabes Polri lebih diprioritaskan pada level pengambil kebijakan, dengan penguatan fungsi polsek dan polres sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Namun, penghapusan satuan wilayah tersebut bukan berarti tanpa dampak. Positifnya, akan terjadi perampingan struktur dan optimalisasi fungsi Polri, sesuai wilayah pelayanannya. Namun di sisi lain akan muncul berbagai persoalan penempatan personel dari polwil dan polwiltabes yang dihapus ke tempat kerja baru. Lalu penumpukan tugas baru di polda akibat likuidasi polwil dan polwiltabes di jajaran polda tersebut. Kemudian, kemungkinan konflik kejiwaan pejabat lama polwil dan polwiltabes yang di-nonjob-kan di tempat tugas baru. Tentu saja, berbagai kemungkinan dampak negatif yang muncul menjadi perhatian yang akan dicari jalan keluarnya. tidak akan merugikan karier dan pengembangan diri anggota.

Selain itu, penghapusan polwil dan polwiltabes telah disosialisasikan teknis penempatan personel menjadi perhatian. Untuk polwiltabes akan berubah menjadi polrestabes, sementara polresta di bawahnya berubah menjadi polsekta. Sebagian personel dari polwiltabes yang dilikuidasi akan ditempatkan di polrestabes dan polsekta di bawahnya. Hal ini untuk meningkatkan fokus pelayanan terhadap masyarakat. Sebagian anggota lainnya ditarik ke polda. tidak menutup kemungkinan kapolsekta berpangkat ajun komisaris besar atau komisaris.

Dampak negatif dari penghapusan polwil dan polwiltabes. Mengakibatkan adanya polda yang akan berperan sebagai satuan kewilayahan langsung di atas polres, polresta, dan polrestabes, diyakini akan kewalahan melakukan pengawasan. Dengan luasan wilayah dan populasi penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa, polwil diperlukan guna membantu polda melakukan supervisi dan pengawasan. Penguatan fungsi polsek dan polres yang diniatkan, seharusnya sejalan dengan fungsi pengawasan. Bila tidak perilaku anggota Polri di bawah semakin tidak terkendali. Namun, fungsi kepolisian berbeda dengan administrasi pemerintahan daerah sehingga tidak dapat begitu saja disamakan.

#### **B. Fungsi kepolisian atas berubahnya status dari Polwiltabes Makassar Menjadi Polrestabes Makassar**

Kepolisian sebagai suatu alat Negara yang diberikan amanah oleh Negara yang telah diatur dalam Undang-undang, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi didalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan (kriminal) yang marak terjadi di Negara serta dilingkungan masyarakat pada khususnya.

Secara umum kualitas pendidikan anggota polri sudah cukup baik, persyaratan pendidikan minimal SLTA telah terpenuhi dan secara alamiah level tamtama akan terhapus di lembaga kepolisian dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian pemahaman terhadap hukum, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan hak asasi manusia perlu di tingkatkan. Langkah ini diperlukan

untuk menekan angka penyimpangan dan pelanggaran profesi yang mengarah pada penistaan HAM.

Peranan Polrestabes pada masyarakat kota Makassar adalah mitra yang saling membutuhkan, kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Kota Makassar ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat kota Makassar dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak

dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-undang kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,<sup>18</sup>slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.

Faktor Penyebab terjadinya perubahan dari polwiltabes ke Polrestabes Makassar:

#### 1. Perkembangan Kota Makassar

Rasio Polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil Rasio Polisi semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya

---

<sup>18</sup>Sahrul Parawie, *Makalah tugas dan wewenang pokok kepolisian*, <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian/>, diakses pada tanggal 10 desember 2016 pukul 16:25.

semakin besar rasio polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidik berlarut-larut, intensitas polri rendah atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara tidak tepat waktu. Rasio kepolisian tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam menekan kriminalitas. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah personil polisi tidak selalu menekan angka kejahatan, karena pada dasarnya tindak kejahatan dapat terjadi karena adanya kemauan, dan kesempatan yang di dukung oleh adanya kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat.

Kasus-Kasus kejahatan konvensional, seperti pencurian, penipuan, penjam-bretan, perampasan dan pemerkosaan sampai dengan pembunuhan yang dianggap sebagai pekerjaan rutin dan bersifat lokal kurang memiliki nilai politis sehingga keberhasilannya, kurang terapresiasi. Menilik dari kondisi diatas ke depan diperlukan updating kebijakan dan regulasi secara terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme polri. Menurunkan rasio polisi masih tetap diperlukan , minimal pencapaian kondisi ideal yang ditetapkan PBB dan untuk mengatasi kesenjangan cakupan pelayanan kepolisian kepada masyarakat harus lebih baik. Indikatornya adalah masyarakat merasa nyaman berhubungan dengan polisi, polisi ada ketika masyarakat membutuhkan serta masyarakat merasa nyaman dan aman beraktifitas.

## 2. Penanganan dalam Satu Komando (*Top Leader*)

Semenjak dipisahkan Polri dari TNI pada tahun 2000 Rasio polisi Indonesia semakin membaik, mengecil, Jika pada akhir program pembangunan nasional(Proponas) 2000-2004 Rasio Polisi Mencapai 1: 750, maka sampai dengan akhir tahun 2008 polisi rasio telah mecapai 1: 578.

Setelah saya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai beberapa anggota kepolisian di Polrestabes Kota Makassar diantaranya atas nama AKBP Bambang bahwa sekaitan dengan pertanyaan saya tentang fungsi kepolisian setelah berubahnya status dari Polwiltabes Makassar menjadi Polrestabes Makassar menjawab bahwa yang berbeda adalah adanya penggabungan antara dua kepolisian resort kota wilayah yaitu kepolisian resort kota Makassar timur atau yang biasa disebut Polresta Makassar Timur dan Kepolisian resort Kota Makassar barat atau biasa disebut Polresta Makassar barat. Kedua Polresta tersebut saat ini digabung atau disatukan menjadi Polrestabes Makassar.

Dan saya juga mewawancarai anggota lain yaitu AKP Arifin yang mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang perubahan secara menyeluruh dari status Polwil menjadi Polresta dan termasuk Polwiltabes Makassar yang berubah menjadi Polrestabes Makassar. Berdasarkan keputusan Kapolri tersebut maka sejak tanggal 31 desember 2009 telah resmi berubah menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

***Data Rasio Peningkatan Personil Kepolisian dengan masyarakat.***

Tahun	Rasio Peningkatan Jumlah Personil Kepolisian
2000-2004	1: 700
2004-2008	1: 550
2008-2012	1: 380
2012-2014	1: 200
2014-2017	1: 100

**Data sumber polrestabes makassar .**

Dari data kepolisian Pada tahun 1995 sampai 2000 rasio polisi dan masyarakat adalah 1:1000 sedangkan pada tahun 2000-2005 rasio tersebut membaik sebanyak 1; 700. Hingga tahun 2004 terdapat 27 ribu personil kepolisian sedangkan tahun sebelumnya hanya 11 ribu personil saja, selain menambah jumlah personil kepolisian masa pensiun petugas kepolisian pun diperpanjang yakni hingga maksimal 58 tahun, dari semula 55 tahun, sebagai perbandingan, di jepang rasio jumlah penduduk dan polisi adalah 1:520 dengan tingkat kejahatan rata-rata 2 juta kasus setiap tahun. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah pencurian dan perampokan.<sup>19</sup>. Dengan berada dalam satu Komando maka dapat mempercepat penanganan kinerja kepolisian untuk melayani masyarakat.

Adapun alasan berubahnya Polwiltabes menjadi Polrestabes adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polisi dari segi operasional. Terkhusus pada kota Makassar agar efektifnya operasional pelaksanaan penegakan hukum di Kota

---

<sup>19</sup> Ambudi, Frans, (2 Mei 2004), *Rasio kepolisian kota makassar*, detik com, diakses tanggal 10 desember 2016.

Makassar maka digabunglah Polres Makassar timur dan Makassar Barat dengan maksud sebagai penanganan terpusat penegakan hukum di Kota Makassar tepatnya di Polrestabes Makassar.

Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting artinya penegak hukum, baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat akan berakibat masyarakat dalam hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam arti yang luas dan mengganggu ketertiban negara. Kejahatan yang timbul tanpa adanya pengamanan dari penegak hukum selain akan membuat resah masyarakat juga akan membuat resah warga negara asing yang berkunjung hadir untuk tujuan wisata.

Termasuk juga sejak berubahnya Polwiltabes menjadi Polrestabes aparat kepolisian sangat efektif dalam menjalankan Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian



- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

### **C. Efektifitas Polisi dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar**

Saya melanjutkan wawancara saya dengan AKBP Bambang. Dan menjelaskan bahwa penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh Polrestabes Makassar itu lebih efektif dibanding dulu waktu Polwiltabes Makassar, sebab dulu personil anggota terbagi-bagi, sebab ada yang di Polwiltabes, ada juga Polres makassar Timur dan ada juga di Polres Makassar barat, di Kepolisian sektor kecamatan atau Polsek pun demikian, dulu belum terlalu efektif sebab personilnya sedikit. Dan sekarang setelah berubah menjadi Polrestabes maka peronil tergabung dari beberapa Polres wilayah timur dan barat sehingga terpusat di Polrestabes Makassar. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus lebih efektif sebab terkordinir. Begitu pun berdampak pada Polsek-polsek ditingkat kecamatan juga penanganannya lebih efektif sebab personilnya bertambah banyak. Sehingga memberi dampak pelayanan maksimal pada masyarakat.

Polisi dituntut mampu menyibak segala macam bentuk kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah

ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Dengan Maraknya tindak kejahatan, Polisi harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya

Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, misalnya melakukan penyidikan tanpa surat perintah dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.<sup>20</sup>

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Seperti kejadian dalam kasus demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Universitas Negeri Makassar yang berujung polisi melakukan tindakan represif

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113-117

yang membabi buta dengan masuk ke dalam kampus dan menembakkan gas air mata di dalam kelas yang sedang berlangsung proses belajar mengajar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi harus bersikap profesional. Apabila polisi tidak mengindahkan sikap profesional sebagai penegak hukum, maka tidak dipungkiri akan terjadi ketimpangan hukum dalam proses pencarian keadilan. Akibatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan senantiasa terancam keharmonisannya. Prinsip profesionalisme yang sebaiknya dikembangkan oleh aparat kepolisian adalah menjadikan polisi bukan sebagai pelanggar HAM, tetapi berada di garis terdepan dalam memperjuangkan HAM. Prinsip ini merupakan kunci yang sangat menentukan efektivitas lembaga kepolisian, yang dampak positifnya akan segera dapat diukur dan dirasakan, seperti meningkatkan kepercayaan dan sikap kooperatif masyarakat, penyelesaian konflik secara damai, dan proses yuridis ke pengadilan dapat berhasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbedaan fungsi kepolisian adalah Adanya penggabungan antara dua kepolisian resort kota wilayah yaitu kepolisian resort kota Makassar timur atau yang biasa disebut Polresta Makassar Timur dan Kepolisian resort Kota Makassar barat atau biasa disebut Polresta Makassar barat. Kedua Polresta tersebut saat ini digabung atau disatukan menjadi Polrestabes Makassar.
2. Penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh Polrestabes Makassar itu lebih efektif dibanding dulu waktu Polwiltabes Makassar.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis akan kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah mulai sejak dini bahwa untuk meningkatkan kinerja Polri terkhusus di Polrestabes Makassar dalam hal tugas, fungsi dan wewenangnya dengan mengacu kepada amanat Undang-undang dalam rangka penegakan hukum maka perlu dipertimbangkan lagi mengenai anggaran kepolisian sehingga dapat terwujud jati diri Kepolisian Republik Indonesia yang lebih mahir, terampil, bersih, bermoral dan berwibawa dalam penanganan setiap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.
2. Kepada Pimpinan Polrestabes Makassar agar pembinaan kemampuan profesional kepolisian agar lebih ditingkatkan yaitu dengan jalan melalui kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan yang berhubungan dengan tugas

kepolisian, khususnya di bidang penyidikan, pembinaan etika profesi, pelatihan dan penugasan secara berjenjang sesuai dengan keahlian masing-masing personil.



LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI

**PERUBAHAN EKSISTENSI POLISI DALAM MENANGANI KEJAHATAN DARI  
POLWILTABES KE POLRESTABES MAKASSAR**

Disusun dan diajukan Oleh :

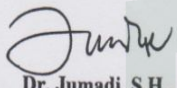
**Muh. Fauzianto KR**  
NIM: 10500113143

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan  
penulisan skripsi

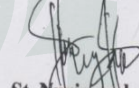
Pada tanggal : 2 Nopember 2016

**DOSEN PEMBIMBING**

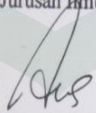
Pembimbing I

  
**Dr. Jumadi, S.H., M.H**  
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II

  
**St. Nuriannah, S.H., M.H**  
NIP. 19760822 200312 2 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
**Istigamah, SH. MH**  
NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



**Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag**  
NIP.19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax: 864923)  
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 756/SL.1/PP.00.9/01/2017  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Samata, 13 Februari 2017

Kepada  
Yth. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar  
Di-  
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh Fauzianto. KR  
N I M : 10500113143  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Bonto Sungguh, Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"Perubahan Eksistensi Polisi Dalam Menangani Kejahatan Dari Polwiltabes menjadi Polrestabes Makassar"**

Dengan dosen pembimbing:

1. DR. Jumadi SH, M.H.
2. St. Nurjannah., S.H., M.H.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar terhitung mulai tanggal 20 Februari 2017 s/d 20 Maret 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.

Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 545 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Muh. Fauzianto KR  
NIM : 10500113143  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari Polwiltabes ke Polrestabes Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H  
Penguji I : Dr. Fadli A. Natsif, M.H  
Penguji : Rahman Syamsuddin, S.H, M.H  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 19 Mei 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan



### PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Fauzianto KR

NIM : 1050011305143

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari  
POLWILTABES ke POLRESTABES Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan	4	
2.	Materi	4	
3.	Penguasaan/Analisa	4	
4.	Cara Presentase	4	
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	.....16...../4 =	4.

Samata, 24 Mei 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Penilai,

ALA UDDIN  
M A K A S S A R


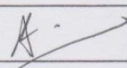
### PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Fauzianto KR

NIM : 1050011305143

JURUSAN : Ilmu Hukum

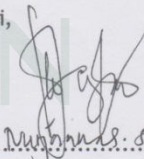
JUDUL SKRIPSI : "Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari  
POLWILTABES ke POLRESTABES Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	...../4 =	

Samata, 24 Mei 2017

Penilai,

ALA UDDIN  
MAKASSAR

  
St. Nurhuda S. Sh. May

### PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Muh. Fauzianto KR

NIM : 1050011305143

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Perubahan Eksistensi Polisi dalam Menangani Kejahatan dari  
POLWILTABES ke POLRESTABES Makassar"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	16 ...../4 =	4

Samata, 24 Mei 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penilai,

ALA UDDIN  
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 1925/SI.1/PP.00.9/ .5/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 19 Mei 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )  
2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)  
3. Dr. Fadli A.Natsif, M.H (Penguji I )  
4. Rahman Syamsuddin S.H, M H ( Penguji II )  
5. Dr. Jumadi, S.H, M.H (Pembimbing I)  
6. St Nurjannah, S.H, M.H (Pembimbing II)  
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh Fauzianto KR  
N I M : 10500113143  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017  
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tj (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Nomor : 502 Tahun 2017**

**T E N T A N G**  
**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 29 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 29 Mei 2017  
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH 03	MKD/UDIS 04	MKKP 05	06	
1	Muh. Fauzianto. KR 10500113143	Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I	Dr. Alimuddin, M.Ag	Dr. Andi Saifriani, M.H	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
2	Nur Khalisah Naisy 10500113132	Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag	Proh. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	Ahkam Jaadi, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Mujahidah, SE Nurhayati Wahid

Samata, 29 Mei 2017

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Nip. 19621016 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 717-Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
              : N a m a : Muh. Fauzianto KR  
              : N I M : 10500113143  
              : Jurusan : Ilmu Hukum  
              : Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017  
              : Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
              : Judul : "Perubahan Eksistensi Polisi Dalam Menangani Kejahatan di Kota Makassar dari POLWILTABES ke POLRESTABES"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
                  b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
                  c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
                  2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
                  3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
                  4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
                  5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
                  6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

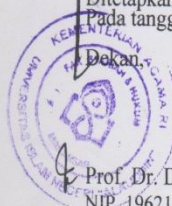
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

**Ketua** : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
**Sekretaris** : Istiqamah, S.H., M.H.  
**Penguji I** : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.  
**Penguji II** : Dr. Fadli Andi Natsif, M.H.  
**Pelaksana** : 1. Mujahidah, SE  
                  2. Nurhayati Wahid

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 12 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 2025/SI.1/PP.00.9/6./2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 12 Juni 2017

Kepada  
Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqmah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (Penguji I)
4. Dr. Fadli Andi Natsif, M.H. (Penguji II)
5. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6. St. Nurjannah, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muh. Fauzianto KR  
NIM : 10500113143  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017  
Buka Sidang : 08.30 WITA  
Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasti Watampone.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remadja Karya.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, 1988. *Kriminologi* . Bandung: Tarsito.
- Jonaedi, Efendi. 2011. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Kastama, I Made. *Lingkungan Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan*.  
[http://Jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpenyang/article/download/36/5\(20Mei2016\)](http://Jurnal.stahntp.ac.id/index.php/tampungpenyang/article/download/36/5(20Mei2016))
- Kansil, Cristine S.T. 2003. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jilid II, cetakan kesebelas). Jakarta: PT Balai Pustaka.
- KoesparmonoIrsan, dalam Eko Prasetyo, dkk., 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Yogyakarta : Publishing,
- Litvack&Seddon dalam SaduWasistiono, 2003.*Kapita Selekt Managemen Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-empat, Bandung,: Fokusmedia.
- Leden, Marpaung. 2005. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martiman, Projohamidjoyo. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: Liberti
- Muhammad Alim. 2010. *Kewenangan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi serta Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Seminar Konstitusi FH-UMI Makassar 5 Novenber.
- Noach, Simanjuntak. B. dan Pasaribu. I. L. 1984. *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- Nurul Qamar. 2010. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar : Pustaka Repleks.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2014 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. VI; Bandung: PT Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono .1983. *Asas-Asas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat.
- Patanduk, Nova. 2013 *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.*: Fakultas Hukum Unhas :Skripsi Makassar
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian ( Profesionalisme dan Repormasi Polri)*. Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :Bina Aksara.
- Rusli Effendi. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Alumni.
- Schaffmeister dkk, 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta :Liberty
- Rusli Effendi. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Alumni
- Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Soerjono Sukanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Press- Jakarta : UI.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1985. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.
- Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sunardjono. 2006. *Hukum Kepolisian, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara)*. Ttp. Tt.Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Topo Santoso / Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian*. Jakarta : PT. Visimedia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.
- Yesmil Anwar /Andang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung : Widya Pajajaran.

## RIWAYAT HIDUP



Muh. Fauzianto. KR, lahir pada tanggal 21 Maret 1996 di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan penulis merupakan anak ke -1 dari 4 bersaudara dari pasangan pak Rivai dan ibu Dewi.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Athirah Bukit Baruga Makassar pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP. Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 9 Makassar dan tamat pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana melalui penerimaan mahasiswa baru SMPTN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R